

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki ciri utama yaitu kekuasaan yang sangat besar dan dominan pada pemerintah pusat yang dapat menimbulkan kecenderungan untuk lebih memberikan kewenangan kepada daerah dalam segala hal. Sejak pemerintahan di Indonesia mengalami krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian menjadi terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepaskan sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah tersebut dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat mereka atas dasar kemampuan sendiri.

Sehingga pemerintah daerah lebih leluasa untuk menciptakan layanan terhadap masyarakat yang lebih baik karena pemerintah daerah menjadi lebih dekat dengan rakyatnya begitu juga sebaliknya, tetapi otonomi daerah bias mengakibatkan adanya kesenjangan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Sehingga pembangunan lebih besar disuatu daerah sementara didaerah lain tertinggal jauh karena perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah atau otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal yang mengharuskan daerah mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi untuk peningkatan di berbagai sektor (Handayani dkk, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai ekonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi (Sutama dan Ismawati, 2018).

Desentralisasi fiskal dapat memberikan kewenangan terhadap pemerintah untuk menggali potensi yang ada di daerah masing-masing dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, ada juga daerah yang mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi mengingat keterbatasan sumber daya yang ada salah satunya adalah infrastruktur penunjang perekonomian daerah tidak tersebar merata. Penerapan desentralisasi pada daerah dituntut untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah, namun tidak semua daerah dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah menggunakan PAD misalnya, daerah dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah menggunakan penggunaan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Karena kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang

mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Handayani, dkk:2017).

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 18 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, di harapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas pendapatan daerah serta PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang (Watulingas dkk:2018). Melalui ekonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan mengalokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat meratakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing wilayah.

Kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi *issue* yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan

kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang akan menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa melanggar norma-norma yang sudah ada dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik menggunakan prinsip *value for money* serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah-kaidah tentang pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara dengan peningkatan prosedur pengendalian dari intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip *stewardship* dan *accountability* (Watulingas, dkk: 2018).

Menurut Ernita dkk (2013) pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam kurun waktu yang panjang, karena merupakan ukuran keberhasilan pembangunan dimana hasilnya dapat dinikmati masyarakat sampai dilapisan paling bawah. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat sebab pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara.

Secara umum pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dicirikan dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Infrastruktur dan sarana prasarana merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi, dengan adanya

infrastruktur yang baik, maka akan meningkatkan produktivitas perekonomian rakyat (Watulingas, 2018).

Menurut Dewi dan Sriwardani (2017) Indonesia adalah negara berkembang, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha berkelanjutan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Untuk membiayai pembangunan daerah tersebut, salah satu modal yang digunakan bersumber dari pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak lepas dari keberhasilan mengelola APBD secara efektif dan efisien. Sebaliknya jika pengelolaan APBD yang buruk maka akan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyatnya (AR dan Zein, 2016).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah atau daerah tersebut. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, pembangunan dapat ditunjukkan pada tiga hal pokok yaitu, meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat,

meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya.

Data dari patikab.bps.go.id pertumbuhan ekonomi dilihat dari produk domestik regional bruto di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi pada tahun 2013-2014 mengalami perlambatan dari 5,97% menjadi 4,64% pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 5,94% dan tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 5,20%, menurut Bupati Pati dalam Pati news pertumbuhan ekonomi tahun 2017 di Pati mengalami kenaikan menjadi 5,98% (sumber: www.patinews.com).

Dalam Radiosuarakudus.com pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kudus, dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren melambat. Tren melambat selama lima tahun terakhir dimulai tahun 2012-2016, khususnya pada tahun 2015 dan 2016, mengingat pertumbuhannya tercatat di bawah 4 persen. Hal itu dikatakan Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah V Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta Hamid Ponco Wibowo pertumbuhan ekonomi Kudus selama 2012-2016 cenderung berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Ia mengatakan kabupaten Kudus memiliki peran besar terhadap perkembangan perekonomian di Jateng. Bahkan, lanjut dia, perekonomian kabupaten Kudus menyumbang 8,30 persen terhadap perekonomian Jateng dan menjadi kabupaten penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap (sumber: www.radiosuarakudus.com).

Berdasarkan data Badan Pusat statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi di kabupaten Rembang mencapai 6,19. Di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi provinsi. Sehingga pertumbuhan ekonomi kabupaten Rembang di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,4 dan pertumbuhan ekonomi provinsi 5,7 (sumber:rembangkab.go.id).

Dalam rapat kerja pemerintah (RKP) 2017 yang diselenggarakan di Istana Negera, kemarin (24/10), Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan di hadapan gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia. Dalam sambutannya meminta agar kepala daerah bisa concern pada pertumbuhan ekonomi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan, bahwa salah satu daerah yang pertumbuhan ekonominya baik di antaranya Blora. Yakni 23,53 persen (sumber: radarbojonegoro.jawapos.com). Perbedaan fenomena peneliti dengan jurnal utama dari Talangamin dkk (2018) adalah obyek penelitian menggunakan obyek penelitian di Kota Tomohon Sulawesi Utara sedangkan peneliti menggunakan obyek penelitian di Se- Eks Karesidenan Pati.

Apabila peningkatan pendapatan asli daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka terdapat kemungkinan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai dana alokasi umum dan dana alokasi khusus umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi pendapatan asli daerah (Dewi dan Suputra, 2017). Sedangkan pengalokasian dana bagi hasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi Nisa (2017). Dana bagi hasil yang diterima akan mempengaruhi pencapaian pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Talangamin dkk (2018) adalah penelitian ini menambahkan variabel dana bagi hasil. Pertimbangan penambahan variabel didasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Laranga dkk (2017) yaitu dana bagi hasil bukan faktor utama dalam proses mempercepat pertumbuhan tetapi berperan penting dalam meningkatkan presentase pertumbuhan melalui penerimaan dan pengolahan yang baik dan efisien, perbedaan lain terdapat pada objek dan tahun pada penelitian Talangamin dkk (2018) menggunakan objek Kota Tomohon Sulawesi Utara pada tahun 2018 sedangkan penelitian ini menggunakan objek Kabupaten Se- Eks Karesidenan Pati pada tahun 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN SE- EKS KARESIDENAN PATI)”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pelaksanaan dalam penelitian ini lebih terarah maka peneliti membatasi ruang lingkup pokok bahasan di instansi pemerintah ini sebagai berikut:

1. Peneliti hanya membahas tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Peneliti hanya mengakses data tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Se- Eks Karesidenan Pati.
4. Informasi yang digunakan dapat sebagai pengetahuan akademik perkuliahan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Se- Eks Karesidenan Pati?
2. Apa pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Se- Eks Karesidenan Pati?
3. Apa pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Se- Eks Karesidenan Pati?
4. Apa pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Se- Eks Karesidenan Pati?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini, adalah:

1. Bagi Pemerintah

Dapat sebagai pertimbangan yang perlu masukan untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Akademik

Dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan mengenai hasil penelitian, untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan. Serta untuk referensi melakukan penelitian sejenis.